

***SOCIALIZATION TO ISLAMIC BOARDING SCHOOL CAREGIVERS IN THE  
CONTEXT OF INCREASING COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN  
THE 2024 ELECTION IN JEMBER REGENCY***

**SOSILISASI KEPADA PENGASUH PONDOK PESANTREN DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN JEMBER**

**Mohammad Thamrin \*<sup>1</sup>, Baktiawan Nusanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Department of Communication Sciences, University of Muhammadiyah Jember, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Government Science, University of Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email: mohammadthamrin@unmuhjember.ac.id <sup>1</sup>, baktiawan@unmuhjember.ac.id <sup>2</sup>

\*Penulis koresponden

**NO WhatsApp Aktiv Penulis (Wajib di isi): [08123456789000](tel:08123456789000)**

**Recieve: 21 Agustus 2024**

**Reviewed: 15 Oktober 2024**

**Accepted: 26 December 2024**

**Abstract:** This article explores the crucial role of students and scholars in Indonesia's socio-political dynamics, with a particular focus on general elections and political empowerment. Santri, as a young generation of intellectuals in Islamic boarding schools, have a great responsibility to actively participate in elections in order to elect leaders with integrity and maintain conduciveness and peace during the election process. Meanwhile, scholars, with their significant influence, play a role not only as spiritual guides but also as agents of change that empower society through political education, enlighten on the importance of healthy political participation, and maintain integrity in the political process. This article also underlines the importance of pesantren as traditional Islamic educational institutions that play a vital role in religious education and active participation in social and political life. In this context, Islamic boarding schools such as the Al Azhar Islamic Boarding School and the Islamic Moral Development Lajnah (LPAI) of Jember Regency also play an important role as activity partners that support community political empowerment with as many as 60 participants from each LPAI recitation every month.

Scholars in practical politics often cause debate because of their great influence and dual functions. The presence of ulama is expected to bring coolness, peace, and moral strength in the government. In the context of elections, people often show a decreased enthusiasm to participate, which is caused by a lack of political influence on their lives. Therefore, campaigns are needed to increase the enthusiasm of public participation in the political process. The dynamics of political mobilization based on religious identity are inseparable from the role of religious institutions such as Islamic boarding schools and religious leaders such as kiai. Students, who are educated in Islamic boarding schools, tend to have different lives and views from the general public, often only focusing on religious sciences without being accompanied by general knowledge. With the development of the times, pesantren are also involved in politics, and the role of pesantren in the political process is increasingly visible. Political leaders often approach pesantren for support, demonstrating the importance of pesantren in Indonesia's social and political life. This article emphasizes that the active role of students and scholars is very important in strengthening democracy, maintaining peace, and empowering the community through political education to create justice, welfare, and peace for the Indonesian people.

**Keyword:** *The Role of Santri and Ulama, Indonesian Political Dynamics, Election Participation, Islamic Boarding School Education*

**Abstrak.** Artikel ini mengeksplorasi peran krusial santri dan ulama dalam dinamika sosial politik Indonesia, dengan fokus khusus pada pemilihan umum dan pemberdayaan politik. Santri, sebagai generasi intelektual muda di pesantren, memiliki tanggung jawab besar untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu guna memilih pemimpin yang berintegritas dan menjaga kondusivitas serta perdamaian selama proses pemilu. Sementara itu, ulama, dengan pengaruh signifikan mereka, berperan tidak hanya sebagai penuntun spiritual tetapi juga sebagai agen perubahan yang memberdayakan masyarakat melalui pendidikan politik, memberikan pencerahan tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat, serta menjaga integritas dalam proses politik. Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang memainkan peran vital dalam pendidikan agama dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, pesantren seperti Ponpes Al Azhar dan Lajnah Pembinaan Akhlak Islamiah (LPAI) Kabupaten Jember juga berperan penting sebagai mitra kegiatan yang mendukung pemberdayaan politik masyarakat dengan jumlah 60 peserta dari setiap pengajian LPAI setiap bulan.

Ulama dalam politik praktis sering kali menimbulkan perdebatan karena pengaruh besar mereka dan fungsi ganda yang diemban. Kehadiran ulama diharapkan dapat membawa kesejukan, kedamaian, dan kekuatan moral dalam pemerintahan. Dalam konteks pemilu, masyarakat sering kali menunjukkan gairah yang menurun untuk berpartisipasi, yang disebabkan oleh kurangnya pengaruh politik terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, kampanye-kampanye diperlukan untuk meningkatkan gairah partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dinamika mobilisasi politik berbasis identitas agama tidak terlepas dari peran lembaga keagamaan seperti pesantren dan tokoh agama seperti kiai. Santri, yang dididik di pesantren, cenderung memiliki kehidupan dan pandangan yang berbeda dari masyarakat umum, sering kali hanya fokus pada ilmu-ilmu agama tanpa dibarengi dengan ilmu umum. Dengan perkembangan zaman, pesantren juga terlibat dalam politik, dan peran pesantren dalam proses politik semakin jelas terlihat. Pemimpin politik sering kali mendekati pesantren untuk mendapatkan dukungan, menunjukkan pentingnya pesantren dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa peran aktif santri dan ulama sangat penting dalam memperkuat demokrasi, menjaga perdamaian, dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan politik untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi masyarakat Indonesia.

**Keyword:** Peran Santri dan Ulama, Dinamika Politik Indonesia, Partisipasi Pemilu, Pendidikan Pesantren

Copyright © 2024, Penulis (Mohammad Thamrin, Baktiawan Nusanto)

[doi:10.32528/jhce.v2i4.2627](https://doi.org/10.32528/jhce.v2i4.2627)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Pemilu adalah mekanisme penting dalam mempertahankan kedaulatan rakyat. Keberhasilan pemilu sering kali diukur dari tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi (Budiardjo, 2007). Menurut Manuel Kaisiepo, pemilu memberikan legitimasi kepada penguasa. Sejak pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, proses ini telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingginya partisipasi politik masyarakat (Lestari et al., 2023)

Pemilu memiliki fungsi vital dalam memilih wakil rakyat yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi, lembaga perwakilan, dan pemilu adalah konsep yang saling terkait erat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati (Wibawa, 2019). Namun, partisipasi politik santri dalam pemilu sering kali rendah karena berbagai faktor. Pesantren lebih fokus pada pendidikan keagamaan, ruang lingkup politik di pesantren seringkali dibatasi, dan kurangnya kerjasama antara pesantren dan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman santri tentang politik (Djamas, 2009).

Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan aspirasi rakyat. Salah satu cara rakyat berpartisipasi dalam demokrasi adalah melalui pemilu. Partisipasi politik sangat penting karena menentukan keberhasilan pemilu (Cholisin & Nasiwan, 2013). Identitas agama sering digunakan sebagai alat mobilisasi politik. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki pengaruh besar dalam politik. Kiai, sebagai pemimpin pesantren, memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi santri dan masyarakat sekitar (Muhtadi, 2019).

Santri biasanya patuh pada kiai, termasuk dalam hal politik. Hal ini membuat santri menjadi massa politik yang potensial. Pesantren sering dijadikan target oleh politisi untuk mendapatkan dukungan (Lubis, 2007). Selain itu, pesantren memainkan peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Seiring waktu, pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan agama tetapi juga berperan dalam politik. Pengaruh kiai tidak hanya pada santri tetapi juga masyarakat sekitar (Ismail et al., 1999).

Sebagai warga negara, santri memiliki hak untuk memilih secara bebas. Namun, mereka sering mengikuti arahan kiai. Oleh karena itu, santri perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memilih secara mandiri demi kebaikan bangsa (Rahman, 2007). Pendidikan politik dan kewarganegaraan penting untuk meningkatkan kesadaran santri tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pemilu. Dengan pemahaman yang baik, santri dapat berpartisipasi aktif dalam membangun demokrasi (Prasetyo, 2023).

Pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri dan memberikan pendidikan moral serta agama (Mastuhu, 1994). Namun, penting untuk memperluas cakupan pendidikan di pesantren agar juga mencakup pendidikan politik. Santri yang memahami pentingnya pemilu dan partisipasi politik akan lebih siap untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan politik di pesantren perlu ditingkatkan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pesantren dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi politik sangat diperlukan (Dedeng et al., 2023). Pemerintah dapat menyediakan materi sosialisasi yang relevan dan mudah dipahami oleh santri. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan santri dapat memahami pentingnya partisipasi politik dalam pemilu dan dapat mengambil keputusan yang bijak saat memberikan suara (Sjoraida & Nugraha, 2023).

Sebagai contoh, kegiatan diskusi dan seminar yang melibatkan kiai dan santri dapat menjadi sarana efektif (Adianto, 2023) untuk menyampaikan informasi tentang pemilu dan partisipasi politik. Kiai sebagai tokoh yang dihormati di pesantren dapat menjadi fasilitator dalam menyampaikan materi sosialisasi (Lubis, 2007; Tarmizi, 2018). Dengan demikian, santri akan lebih mudah menerima informasi dan memahami pentingnya pemilu.

Selain itu, penggunaan media sosial dan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi (Ermadiani et al., 2023) tentang pemilu kepada santri. Santri yang aktif menggunakan media sosial dapat dijadikan agen sosialisasi yang menyebarkan informasi kepada teman-teman mereka. Dengan demikian, informasi tentang pemilu dapat menyebar lebih luas dan cepat di kalangan santri.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, termasuk santri, pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember, diperlukan upaya sosialisasi yang intensif. Pengabdian kepada masyarakat oleh LPAI bertujuan untuk membuka pemikiran masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam demokrasi dan mendorong partisipasi aktif mereka (Irawan, 2018).

Program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi politik dan dapat mengambil keputusan yang bijak saat memberikan suara dalam pemilu.

Selain itu, program pengabdian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan santri. Dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya partisipasi politik, santri diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, sosialisasi kepada pengasuh pondok pesantren dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Pasa & Marzuki, 2021) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember adalah langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang sejati. Melalui sosialisasi dan pendidikan politik, diharapkan santri dapat memahami pentingnya pemilu dan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **METODE KEGIATAN**

Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang bersamaan dengan kegiatan pengajian LPAI yang akan dilaksanakan di beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Jember. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari bulan Desember 2023 hingga awal Februari 2024. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan institusi terkait dalam rangka meningkatkan partisipasi politik menjelang Pemilu 2024.

### **1. Pentahapan Kegiatan**

## 1.1 Tahap Persiapan

### a. Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi Internal: Mengadakan pertemuan awal dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pengurus/Pembina LPAI, pengasuh Pondok Pesantren, dan aktivis LPAI untuk merancang strategi pelaksanaan program. Komunikasi dengan Pihak Eksternal: Berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti Polres Jember, Kodim 0824 Jember, FKUB Jember, dan Kemenag Jember untuk mendapatkan dukungan dan integrasi dalam sosialisasi.

### b. Penyusunan Rencana Kegiatan

Menyusun detail rencana kegiatan yang meliputi agenda, materi sosialisasi, dan target peserta. Menetapkan jadwal pelaksanaan dan lokasi kegiatan di berbagai Pondok Pesantren.

### c. Perencanaan Logistik dan Anggaran

Mengidentifikasi kebutuhan logistik seperti alat tulis, bahan sosialisasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Menyusun anggaran untuk setiap kegiatan, termasuk biaya operasional, honorarium narasumber, dan akomodasi.

## 1.2 Tahap Pelaksanaan

### a. Pelaksanaan Kegiatan

Tempat Pelaksanaan: Sosialisasi akan dilakukan di beberapa Pondok Pesantren yang terlibat dalam kegiatan pengajian LPAI. Lokasi ini dipilih untuk memastikan aksesibilitas peserta dan efektivitas komunikasi. Jadwal Pelaksanaan: Setiap kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jumat Manis, dengan jadwal yang telah ditentukan untuk setiap bulan dari Desember 2023 hingga Februari 2024.

### b. Sosialisasi dan Pengukuran

Sosialisasi: Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi politik, tahapan pemilu, dan peran masyarakat dalam pemilu. Narasumber yang terlibat akan mencakup pengasuh pesantren, perwakilan Polres Jember, Kodim 0824 Jember, FKUB Jember, serta penyusun proposal pengabdian. Pengukuran: Mengadakan sesi pengukuran sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengevaluasi perubahan pemahaman dan kesiapan peserta terhadap pemilu. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai efektivitas sosialisasi dan membuat penyesuaian jika diperlukan.

### c. Sasaran dan Partisipasi

Sasaran Peserta: Menargetkan 60 peserta dari setiap pengajian LPAI setiap bulan. Peserta diharapkan adalah santri dan masyarakat sekitar yang memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keterlibatan Narasumber: Narasumber akan melibatkan pengasuh pesantren, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai partisipasi politik.

## 2. Evaluasi dan Pelaporan

### a. Evaluasi Kegiatan

Metode Evaluasi: Menggunakan survei dan kuesioner untuk mengumpulkan feedback dari peserta mengenai materi dan metode sosialisasi. Evaluasi juga mencakup analisis data pengukuran sebelum dan sesudah sosialisasi. Pelaporan: Menyusun laporan evaluasi yang mencakup hasil kegiatan, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

### b. Pelaporan Hasil

Menyusun laporan akhir tentang hasil pelaksanaan kegiatan, termasuk tingkat partisipasi yang berhasil dicapai, dampak sosialisasi terhadap pemahaman politik peserta, dan kontribusi program terhadap peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Jember.



Gambar 1  
Gambaran flowchart kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemilu Sebagai Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana utama dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Proses pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas penting untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama santri, tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi santri dalam pemilu sangat penting karena suara mereka dapat mempengaruhi masa depan Indonesia.

Santri perlu memahami bahwa jika mereka tidak berpartisipasi, mereka tidak bisa menyalahkan hasil pemilu jika pemimpin yang terpilih tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, peran kiai dan ulama sangat penting dalam memberi teladan kepada santri mengenai pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Kiai dan ulama memiliki pengaruh besar dalam masyarakat pesantren dan bisa memotivasi santri untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Pemilu adalah pesta demokrasi, dan perbedaan pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat. Kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berita hoaks masih menjadi tantangan dalam setiap pemilu. Oleh karena itu, peran santri sebagai kaum intelektual sangat penting dalam menjaga kondusivitas pemilu dan memastikan pemilu berlangsung damai tanpa kekerasan maupun intimidasi. Santri harus menjadi contoh dalam menjaga perdamaian dan ketertiban selama proses pemilu.

Selain itu, pemilu juga menjadi ajang pembelajaran bagi santri tentang demokrasi. Mereka bisa belajar tentang bagaimana sistem demokrasi bekerja, pentingnya partisipasi politik, dan bagaimana menjaga integritas dalam proses pemilu. Melalui pemilu, santri bisa belajar tentang pentingnya tanggung jawab sebagai warga negara dan bagaimana suara mereka bisa mempengaruhi kebijakan publik.

### 2. Posisi Tokoh Masyarakat/Ulama/Pengasuh Pesantren dan Santri Dalam Pemberdayaan Potensi Politik

Tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga kedamaian selama pemilu. Ulama dan santri harus menjaga NKRI dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Mereka juga harus berperan dalam melawan hoaks untuk mewujudkan pemilu yang damai. Ulama memiliki kedudukan yang sangat terhormat dalam masyarakat Islam dan berpengaruh besar dalam dinamika sosial. Mereka berperan sebagai dai (penyiar agama Islam), pemimpin ruhani, serta pembina dan penuntun umat.

Karisma ulama memberikan pengaruh besar dalam masyarakat. Ulama dipandang sebagai pewaris para Nabi dan menjadi sumber legitimasi dalam berbagai aspek kehidupan. Peran ulama dalam masyarakat

Indonesia sangat signifikan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kebudayaan. Ulama juga sering menjadi sumber nasihat dan bimbingan bagi masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan potensi politik, ulama dan santri memiliki peran penting. Mereka bisa menjadi agen perubahan yang mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan menjaga integritas dalam proses politik. Ulama bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan bagaimana menjaga perdamaian selama proses pemilu.

Selain itu, ulama dan santri juga bisa menjadi agen pemberdayaan politik dengan cara memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mereka bisa mengadakan diskusi, seminar, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan bagaimana menjaga integritas dalam proses politik. Dengan demikian, ulama dan santri bisa berperan aktif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

### **3. Peran Ulama dan Pesantren Dalam Dinamika Sosial Politik**

Secara historis, ulama selalu menjadi sosok yang penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Mereka sering menjadi penentu dalam kemajuan peradaban. Ulama memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Mereka dihormati dan dianggap sebagai simbol solidaritas perjuangan umat. Peran ulama dalam dinamika sosial politik sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan mengatasi konflik.

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, juga memiliki peran penting dalam dinamika sosial politik. Pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Santri yang belajar di pesantren tidak hanya mendapatkan pendidikan agama, tetapi juga pendidikan tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Pesantren juga sering menjadi tempat diskusi dan perdebatan tentang berbagai isu sosial dan politik. Ulama yang menjadi pengasuh pesantren sering memberikan pencerahan kepada santri tentang pentingnya menjaga integritas dalam proses politik dan bagaimana berperan aktif dalam memperkuat demokrasi. Dengan demikian, pesantren berperan penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi dan partisipasi politik.

Selain itu, pesantren juga sering menjadi tempat penyelesaian konflik. Ulama yang menjadi pengasuh pesantren sering diminta untuk memberikan nasihat dan mediasi dalam berbagai konflik sosial dan politik. Dengan demikian, pesantren berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan dalam masyarakat.

### **4. Tarik Menarik/Peran Ganda Ulama/Pengasuh Pesantren Dalam Dinamika Politik Praktis**

Peran ulama dalam politik sering menimbulkan perdebatan. Ada yang mendukung keterlibatan ulama dalam politik dengan alasan bahwa mereka memiliki hak dan aspirasi politik seperti warga negara lainnya. Namun, ada juga yang menentang dengan alasan bahwa politik adalah dunia yang "kotor" dan keterlibatan ulama dapat merusak citra mereka.

Ulama memiliki tiga fungsi penting: mempertahankan tradisi sosial dan keagamaan, menyediakan ruang untuk menyelesaikan konflik, dan menjadi penggerak perubahan yang dinamis. Fungsi-fungsi ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan masyarakat yang masih memosisikan agama sebagai variabel utama dalam budaya mereka.

Keterlibatan ulama dalam politik praktis dapat bermacam-macam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka sering terlibat dalam momen-momen politik penting seperti pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Motif keterlibatan ulama dalam politik bisa berbeda-beda, tergantung pada dorongan internal dan eksternal.

Ada empat tipologi ulama dalam sikap politik mereka:

1. Pragmatis: Mengintegrasikan diri dalam kekuasaan dan meninggalkan label ideologis.
2. Akomodatif: Reseptif dan kompromis, tetapi tidak selalu berintegrasi.
3. Transformatif: Memiliki komitmen perubahan mendasar tetapi menolak cara-cara radikal.
4. Prinsipalis: Menghendaki ditegakkannya prinsip-prinsip dasar Islam.

Kehadiran ulama dalam politik praktis diharapkan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta menjadi kekuatan moral dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Namun, keterlibatan ulama dalam politik praktis juga dapat menjadi kontroversial jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Secara historis, ulama telah memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Peran mereka dalam politik tidak bisa diabaikan. Meski demikian, penting bagi ulama untuk menjaga integritas dan nilai-nilai moral dalam keterlibatan mereka dalam politik. Dengan demikian, mereka dapat terus memainkan peran yang signifikan dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi masyarakat.





Gambar 2

Sosialisasi Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Di Masjid Kyai Agung Senadin Kec. Panti-Jember

Dari gambar 2 bahwansannya Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjelang Pemilu 2024, diadakan sosialisasi kepada pengasuh pondok pesantren di Masjid Kyai Agung Senadin, Kec. Panti, Jember. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran aktif pesantren dalam proses politik. Dengan kehadiran tokoh agama dan ulama, diharapkan dapat mendorong santri dan masyarakat sekitar untuk lebih berpartisipasi dalam pemilu, memilih pemimpin yang berintegritas, serta menjaga perdamaian selama proses pemilu berlangsung. Kegiatan ini juga didukung oleh Ponpes Al Azhar dan Lajnah Pembinaan Akhlak Islamiah (LPAI) Kabupaten Jember.



Gambar 3

Rapat Pembahasan Materi Pengabdian Masyarakat 2023/2024 yang diadakan Pengurus LPAI bersama unsur Polres Jember, Kodim 0824 Jember, dan Tokoh Masyarakat/Kyai Pengasuh Pondok Pesantren

Dari gambar 3 Pengurus Lajnah Pembinaan Akhlak Islamiah (LPAI) mengadakan rapat pembahasan materi Pengabdian Masyarakat 2023/2024 di Jember. Rapat ini melibatkan unsur Polres Jember, Kodim 0824 Jember, serta tokoh masyarakat dan kyai pengasuh pondok pesantren. Tujuan rapat ini adalah untuk menyusun program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan kerjasama yang solid antara lembaga pemerintahan, aparat keamanan, dan tokoh agama, diharapkan program pengabdian masyarakat ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Jember.



Gambar 4  
Sosialisasi kepada salah satu Pondok Pesantren di Jember, terkait Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 2024

Pada gambar 4 diadakan sosialisasi di salah satu pondok pesantren terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam proses politik. Dengan dukungan ulama dan pengasuh pesantren, santri dan masyarakat sekitar diharapkan lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sosialisasi ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan menjaga perdamaian selama pemilu berlangsung. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia.



Gambar 5  
Musyawarah terkait Pemilu 2024 bersama beberapa Pengasuh Pondok Pesantren di Jember

Pada gambar 5 diadakan musyawarah terkait Pemilu 2024 bersama beberapa pengasuh pondok pesantren. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pengasuh pesantren memberikan pandangan dan saran mengenai cara terbaik mendidik santri dan masyarakat sekitar tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Selain itu, musyawarah ini juga menekankan perlunya menjaga perdamaian dan kondusivitas selama proses pemilu. Dengan kolaborasi antara ulama dan tokoh agama, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat, sehingga demokrasi di Indonesia semakin kuat dan stabil.

## KESIMPULAN

Artikel ini menguraikan peran penting santri dan ulama dalam dinamika sosial politik di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum dan pemberdayaan politik. Santri sebagai generasi muda intelektual di pesantren memiliki tanggung jawab besar untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu guna memilih pemimpin yang berintegritas. Mereka juga memiliki peran signifikan dalam menjaga kondusivitas dan perdamaian selama proses pemilu, serta melawan kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berita hoaks.



Ulama dan tokoh masyarakat memiliki kedudukan terhormat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik. Mereka tidak hanya menjadi penuntun spiritual tetapi juga agen perubahan yang memberdayakan masyarakat melalui pendidikan politik. Ulama berperan dalam memberikan pencerahan tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat dan menjaga integritas dalam proses politik.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional juga memainkan peran krusial dalam dinamika sosial politik. Santri di pesantren mendapatkan pendidikan tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pesantren sering menjadi tempat diskusi dan penyelesaian konflik, serta pusat pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan ulama dalam politik praktis sering menimbulkan perdebatan karena mereka dianggap memiliki pengaruh besar dan fungsi ganda. Ada ulama yang berperan pragmatis, akomodatif, transformatif, atau prinsipalis dalam sikap politik mereka. Kehadiran ulama dalam politik diharapkan dapat membawa kesejukan, kedamaian, dan menjadi kekuatan moral dalam pemerintahan. Namun, penting bagi ulama untuk tetap menjaga integritas dan nilai-nilai moral dalam keterlibatan mereka dalam politik.

Secara keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya peran aktif santri dan ulama dalam memperkuat demokrasi, menjaga perdamaian, dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan politik. Dengan demikian, mereka dapat terus berkontribusi dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi masyarakat Indonesia

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, S. (2023). Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(1 SE-Volume 1 Nomor 2 April 2023), 23–30. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i1.9>
- Budiardjo, M. (2007). Dasar Dasar Ilmu Politik. In *Universitas Nusantara PGRI Kediri* (revisi, Vol. 01). Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin, & Nasiwan. (2013). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Ombak.
- Dedeng, D., Nugraha, A., Pasyah, T., Syaifuddin, M., Idris, A., Saputra, R., & Yunithia Putri, T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuwasin. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(3 SE-Volume 1 Nomor 3 Juni 2023), 224–231. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i3.36>
- Djamas, N. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia : Pascakemerdekaan*. Rajawali Press.
- Ermadiani, Mukhis, Hidayat, A., & Kesuma, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Membayar Pajak Di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(5 SE-Volume 1 Nomor 5 Oktober 2023), 600–608. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i5.125>
- Irawan, A. (2018). *Akar Sejarah Etika Pesantren Di Nusantara : Dari Era Sriwijaya Sampai Pesantren Tebu Ireng Dan Ploso* (T. Pram (ed.)). Mizan Media Utama.
- Ismail, F., Khuluq, L., & Rosyidi, I. (1999). *Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Islam Dan Pancasila / Faisal Ismail ; Penerjemah Dan Penyunting, Imron Rosyidi ; Editor, Latiful Khuluq*. Tiara Wacana.
- Lestari, A., Arsyad, D. H., Nur'aini, A., Nursifa, N., Iqbal, M., & Safar, A. W. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Pesisir Tentang Pelayanan Adminstrasi Publik di Dusun Salu Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi Dan Berkarya*, 1(2), 34–38. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v1i2.254>
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islami: kyai & pesantren*. Elsaq Press. <https://books.google.co.id/books?id=OP89NwAACAAJ>
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantre*. INIS.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral : Mengurai jalan panjang demokrasi prosedural* (petama). Intrans Publishing.
- Pasa, M. F. I., & Marzuki. (2021). Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Dalam Pasangan Joko Widodo Dan K.H. Ma'ruf Amin Pada Pilpres Tahun 2019. *Journal Student : Media Kajian Mahasiswa Kewarganegaraan*, 10(05), 522–534.

- Prasetyo, R. E. (2023). Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 39–49. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26559>
- Rahman. (2007). *Sistem politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sjoraida, D. F., & Nugraha, A. R. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Politik Melalui Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(2 SE-Volume 1 Nomor 2 April 2023), 104–111. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i2.20>
- Tarmizi. (2018). Bimbingan Konseling Islami. In *IALLT Journal of Language Learning Technologies* (Vol. 14, Issue 1). Perdana Mulya Sarana. <https://doi.org/10.17161/iallt.v14i1.9040>
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>